

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Hanafi, Asaa-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asaa Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002
- Chollisin, Dkk, Pengantar Ilmu Politik (Introduction To Political Science), PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- C. S. T Kansil, Dasar-Dasar Ilmu Politik, UNY Press, Yogyakarta, 1986
- Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Dede Rosyada, Hukum Islam dan Prana Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992
- Djazuli, Fiqih Jinayah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., dan Kristina, S.H., M.H, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017
- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Frenada Media Group, Jakarta, 2018
- H.A Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000

- Hanta Yuda A. R, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Jazuli, *Fiqih Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Jimmlly Asshidiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Jimmlly Asshidiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Jimmlly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008
- M. Khoirul Anwar, Vina Selvina, *Perilaku Partai Politik*, UMM Press, Malang, 2006
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- P. A. F. Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Rahmadi Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992
- Riswandha Imawan, *Memberi Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
- Saleh, Dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Jurnal

Andi Suhardiyanto, Puji Lestari, "Partisipasi Politik Perempuan Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008", Forum Ilmu Sosial, Vol. 35, Nomor 2, 2008

Andik Abdul Rahman, "Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019", Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, Nomor 3, 2017

Bakhrul Amal, "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, Nomor 3, 2019

Daud M Liando, "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 3, Nomor 2, 2016.

Dede Sri Kartini, "Demokrasi dan Pengawasan Pemilu", Journal Of Governace, Vol. 2, Nomor 2, 2017

Dudung Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu", Galuh Justiti, Vol. 7, Nomor 1, 2019

Dyan Puspitasari, "Peran Dewan Kehormatan Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia", Lentera Hukum, Vol. 5, Nomor 3, 2018

Edi Setiadi, "Kejahatan Dibidang Pemilu", MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 19, Nomor 1, 2003

Fauzan Ali Rasyid, "Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa", Mimbar, Vol. 25, Nomor 2, 200

- Febry Chrisdanty, "Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Di Wilayah Kabupaten/Kota", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, Nomor 2, 2014
- Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Integritas Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 5, Nomor 1, 2019
- Heru Nugroho, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dnamika Sosial Politik Di Indonesia", Vol. 1. Nomor 1, 2012
- Hidayati, "Penengakan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Penyelenggara Pemilu", *Jurnal Reusam*, Vol. 14, Nomor 1, 2019
- Ibrahim Bafadhol, *Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, Edukasi Islami, Vol. 6, Nomor11, 2017
- Lulu Kukuh Sekartadi, 'Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusana Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013)', *Jurnal Ius*, Vol. 3, Nomor8, 2015
- Lusy Liany, "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, Nomor 1, 2016
- Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu", *Veritas*, Vol. 5, Nomor 2, 2019
- Marlina Gazali, *Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa*, *Neliti*, Vol. 6, Nomor 1, 2013

- Nora Feriyani, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu”, 2 *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Nomor 1, 2019
- Novianti M. Hantoro, “Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014”, *Negara Hukum*, Vol. 5, Nomor 2, 2014
- Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi Strategi Dalam Pemilu*”, *Resolusi*, Vol. 1, Nomor 1, 2018
- Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Vol. 6, Nomor 4, 2009
- Sukawati Lanang P. Perbawa, *Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum*”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 3, Nomor 1, 2019
- Suparman Marzuki, “*Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Yang Demokrasi*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, Nomor 3, 2008

C. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

KUHP

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil
Presiden

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode
Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang No 1 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati Dan
Walikota

PKPU Nomor 23 Tahun 2018

D. Sumber Internet

Adhitya Ariwirawan, Jenis-Jenis Hukuman Menurut KUHP,
<https://www.scribd.com/document/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP> pada tanggal 14 Juli 2020 Pukul 3.28 WIB

Heri Herdianto “Dinyatakan Terbukti Langgar Aturan Kampanye Caleg PKS
Ciamis divonis 4 Bulan Kurungan” diakses dari
<https://www.harapanrakyat.com/2019/05/caleg-pks-ciamis-divonis-4-bulan-kurungan/> pada tanggal 2 Maret 2020 Pukul 23.31 WIB

Hukum Online. Com, Topo Santoso Paparkan Pentingnya Hukum Pidana dalam
Proses Demokrasi,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt545d53acce43e/topo-santoso-paparkan-pentingnya-hukum-pidana-dalam-proses-demokrasi?page=all>

pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 04.38 WIB

Radar Priangan.com. “Money Politic, Caleg PKS Ciamis divonis 4 Bulan Penjara”

diakses dari <https://radarpriangan.com//money-politic-caleg-pks-ciamis-divonis-4-bulan-penjara/#> pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 11.32 WIB

